

Pemerataan Pendidikan: Studi Kasus 34 Provinsi di Indonesia

Riris Sira Torsina Sihombing *

* Penulis korespondensi. Jurusan Ilmu Ekonomi, Universitas Katolik Parahyangan, Indonesia.

Naufal Putra Kusuma

Jurusan Ilmu Ekonomi, Universitas Katolik Parahyangan, Indonesia.

Abstract

JEL Classification Code:
I24, H52, H75

Kata kunci: Gini Pendidikan, Dana Pendidikan, Infrastruktur Pendidikan, Tingkat Pendapatan.

Email penulis:
2017110023@student.unpar.ac.id*,
2017110048@student.unpar.ac.id

Education is essential in improving the quality of human capital and social equity in income. However, the critical role of education still needs to be matched by equal access to education for all people in every region. The research wanted to determine education inequality in 34 Indonesian provinces from 2015 to 2019. This research also identified whether or not there was an influence between education funds, education infrastructure, and the average income level on the education gini. The results obtained show that there is a high educational disparity between the western and eastern regions of Indonesia. Using the Panel Least Square (PLS) technique, the results show that education funding and infrastructure have a negative and significant relationship. Meanwhile, the income variable has a positive relationship, but the results are insignificant.

Abstrak

Pendidikan sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pemerataan sosial dalam pendapatan. Namun demikian, peran kritis pendidikan tersebut tetap perlu diimbangi dengan pemerataan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat di setiap daerah. Penelitian ini ingin mengetahui ketimpangan pendidikan di 34 provinsi Indonesia dari tahun 2015 hingga 2019. Penelitian ini juga mengidentifikasi ada atau tidaknya pengaruh antara dana pendidikan, infrastruktur pendidikan, dan tingkat pendapatan rata-rata terhadap gini pendidikan. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa terdapat disparitas pendidikan yang tinggi antara wilayah barat dan timur Indonesia. Dengan menggunakan teknik Panel Least Square (PLS), diperoleh hasil bahwa pendanaan dan infrastruktur pendidikan memiliki hubungan yang negatif dan signifikan. Sedangkan variabel pendapatan memiliki hubungan yang positif, namun hasilnya tidak signifikan.

Pendahuluan

Pendidikan secara umum berperan bagi peningkatan kualitas modal manusia dan sebagai pemerataan sosial dalam hal pendapatan. Pendidikan dan pendapatan berhubungan positif, dimana semakin tinggi pendidikan, semakin tinggi pula pendapatan individu (Lin, 2007). Hal tersebut dikarenakan pendidikan dianggap memegang peran sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan teknologi. Peran pendidikan tersebut pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi riil dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi (Hartoyo et al., 2017).

Pentingnya peran pendidikan mendorong pemerintah untuk meningkatkan akses pendidikan yang merata bagi seluruh masyarakat. Namun, masih banyak negara yang belum mampu menyediakan pendidikan yang merata dan dapat diakses oleh masyarakat, sehingga ketimpangan pendidikan menjadi perhatian bagi setiap negara saat ini. Seperti yang ditunjukkan oleh penelitian Thomas et al. (2000) yang menyatakan bahwa akses pendidikan di antara berbagai kelompok di banyak negara sangat tidak merata. Kesenjangan pendidikan dapat sangat terlihat melalui kesenjangan perkembangan pendidikan di daerah perkotaan dan pedesaan. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Shao et al. (2019) yang meneliti mengenai kesetaraan pendidikan pada 423 kabupaten di 5 provinsi di China pada tahun 2017. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi ketidakadilan pendidikan di China terutama di daerah pedesaan yang kemudian menyebabkan ketimpangan pertumbuhan ekonomi antar daerah. Keadilan dan kesetaraan pendidikan dapat dicerminkan melalui koordinasi pembangunan pendidikan setiap wilayah. Xie (2011) pada penelitiannya telah menganalisis disparitas pendidikan antar 31 provinsi di China periode 2001 hingga 2008 dan menemukan bahwa pembangunan pendidikan yang tidak terkoordinasi di antara provinsi-provinsi di China telah menjadi salah satu masalah pembangunan daerah yang signifikan.

Kesenjangan pendidikan berkaitan dengan tidak meratanya alokasi dana khusus untuk pendidikan yang disalurkan bagi setiap daerah sehingga menghambat pemerataan pembangunan akses pendidikan. Penelitian Shao et al. (2019); Cahyaningsih & Fitriady (2019) menyatakan bahwa dana pendidikan berpengaruh terhadap gini pendidikan. Cahyaningsih & Fitriady (2019) mengatakan salah satu penyebab terjadinya kesenjangan pendidikan, yaitu karena dana yang dialokasikan untuk setiap daerah sangat bervariasi. Alokasi dana pendidikan yang tidak merata menyebabkan tidak meratanya pembangunan pendidikan setiap daerah. Pemerataan alokasi anggaran dapat digunakan untuk membangun infrastruktur pendidikan, baik di pedesaan maupun di perkotaan. Lebih jauh lagi, semakin banyaknya pembangunan infrastruktur pendidikan menandakan semakin banyak akses pendidikan yang tersedia bagi masyarakat. Hal tersebut dalam jangka panjang akan meningkatkan kualitas pendidikan yang dapat ditandai dengan adanya peningkatan angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah.

Kesenjangan pendidikan memiliki kaitan erat dengan kesenjangan pembangunan infrastruktur pendidikan. Penelitian Schady & Paxson (2002); Ndjebakal Souck & Nji (2017); Barrett et al. (2019) menemukan bahwa adanya infrastruktur pendidikan memiliki pengaruh terhadap ketimpangan pendidikan. Schady & Paxson (2002) menyatakan bahwa melakukan pembangunan dan renovasi fasilitas sekolah berdampak positif terhadap tingkat pendidikan di Peru tahun 1999. Sekolah dengan fasilitas yang memadai dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan angka partisipasi dan pemerataan pendidikan (Barrett et al., 2019). Sedangkan Ndjebakal Souck & Nji (2017) meneliti pengaruh fasilitas sekolah terhadap efisiensi kegiatan belajar mengajar di Kamerun pada tahun 2016. Hasil yang didapatkan menunjukkan fasilitas sekolah meningkatkan efisiensi kegiatan pembelajaran.

Selanjutnya, terjadinya kesenjangan pendidikan juga berkaitan dengan adanya perbedaan pendapatan. Keterkaitan tingkat pendapatan terhadap ketimpangan pendidikan telah diteliti oleh Machin & Vignoles (2004); Lin (2007); Pfeffer (2018). Hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara tingkat pendapatan dan ketimpangan pendidikan. Machin & Vignoles (2004) meneliti hubungan antar pendapatan dengan pencapaian pendidikan di negara UK. Hasil yang didapatkan menunjukkan terdapat hubungan yang kuat antara pendapatan dan pencapaian pendidikan pada individu kelahiran 1958 dan 1970. Semakin tinggi tingkat pendapatan yang didapatkan oleh orang tua, maka anak-anak mereka cenderung akan memiliki tingkat pencapaian pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang tua yang memiliki pendapatan yang rendah. Hal ini dapat membuat ketidaksetaraan pendidikan semakin tinggi dikarenakan persentase anak yang mendapatkan pendidikan tinggi dari kalangan keluarga kaya terus meningkat setiap tahunnya.

Kesenjangan pendidikan telah menjadi permasalahan yang mendapat perhatian khusus di beberapa negara, tidak terkecuali di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara yang masih mengalami banyak permasalahan ketimpangan pendidikan. Berdasarkan laporan BPS, pada tahun

2015 tercatat bahwa ketimpangan antar individu dalam capaian tingkat pendidikan berada pada angka 0,298. Angka tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat penduduk yang belum menikmati pendidikan secara merata. Semakin rendahnya angka ketimpangan mendekati 0 menandakan semakin kecil ketimpangan, sementara semakin tingginya angka ketimpangan mendekati 1 menandakan semakin besar ketimpangan. Disisi lain, ketimpangan pendidikan di Indonesia dapat pula dilihat melalui rata-rata lama sekolah antar wilayah. Berdasarkan laporan BPS, rata-rata lama sekolah antar wilayah Indonesia pada tahun 2019 menunjukkan bahwa wilayah barat memiliki rata-rata lama sekolah sebesar 8,66 persen, wilayah tengah sebesar 8,44 persen, dan wilayah timur sebesar 8,23 persen. Data tersebut mengindikasikan telah terjadinya ketimpangan pendidikan antar wilayah di Indonesia, dimana wilayah Indonesia bagian barat mendominasi pencapaian rata-rata lama sekolah paling tinggi, sementara wilayah timur memiliki pencapaian paling rendah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh dana pendidikan, infrastruktur pendidikan, dan pendapatan masyarakat terhadap ketimpangan pendidikan di Indonesia. Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai hubungan ketiga variabel terhadap ketimpangan pendidikan sehingga dapat tercapainya kualitas pendidikan yang lebih baik. Untuk mencapai tujuan tersebut, alokasi anggaran pemerintah untuk pendidikan menggunakan total anggaran yang diperoleh dari transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) dan pendapatan asli daerah (PAD) di setiap provinsi, infrastruktur pendidikan dilihat melalui jumlah bangunan sekolah di setiap provinsi, dan pendapatan diukur melalui rata-rata pendapatan masyarakat di setiap provinsi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data dari 34 provinsi di Indonesia selama periode 2015-2019 menggunakan data tahunan.

Landasan Teori dan Tinjauan Literatur

Penelitian ini menggunakan beberapa teori dan konsep dasar untuk memahami pemerataan pendidikan di Indonesia. Adapun teori dasar yang digunakan meliputi (1) Pemerataan Pendidikan; (2) Alokasi Dana Pemerintah untuk pendidikan; (3) Keterkaitan Infrastruktur Pendidikan dan Ketimpangan Pendidikan; dan (4) Keterkaitan Pendapatan dan Ketimpangan Pendidikan.

Pemerataan Pendidikan

Pemerataan pendidikan menjadi salah satu fokus utama pembangunan manusia di beberapa negara, termasuk Indonesia. Pendidikan diyakini sebagai investasi modal manusia yang perlu ditingkatkan. Pentingnya pendidikan mendorong pemerintah mengupayakan berbagai cara agar akses pendidikan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat, baik di perkotaan maupun pedesaan. Dalam melihat ada atau tidaknya ketimpangan yang terjadi, Thomas et al. (2000) menggunakan indeks gini pendidikan yang mirip digunakan dengan koefisien gini dalam mengukur distribusi kekayaan atau pendapatan, yang menunjukkan angka 0 sebagai *perfect equality* hingga angka 1 yang mewakili *perfect inequality*. Gini koefisien untuk pendidikan telah digunakan oleh peneliti sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Maas (1982); Lin (2007); Shao et al. (2019). Maas (1982) menggunakan gini pendidikan dalam mengidentifikasi hubungan antara gini pendidikan dan tingkat partisipasi sekolah di 16 negara Afrika Timur. Hasil yang didapatkan menunjukkan hubungan yang negatif antara gini pendidikan dan tingkat partisipasi sekolah. Lin (2007) dengan menggunakan konsep gini pendidikan menemukan bahwa ketimpangan pendidikan menurun dikarenakan tingkat rata-rata lama sekolah meningkat selama periode 1976-2003 di Taiwan. Sedangkan Shao et. (2019) menggunakan gini pendidikan dalam mengukur ketimpangan pendidikan antara provinsi pendapatan tinggi dengan pendapatan rendah. Hasil menunjukkan terdapat gap yang besar terjadi antar provinsi di China di tahun 2017.

Thomas et al. (2000) menyatakan bahwa terdapat dua metode yang dapat digunakan untuk mengetahui koefisien gini, yaitu metode langsung dan tidak langsung. Sama halnya dengan melihat gini pendapatan, Thomas et al. mengembangkan kembali formula yang dikembangkan oleh Deaton (1998) dengan menggunakan variabel pendidikan. Sedangkan dengan metode tidak langsung, perhitungan menggunakan kurva *Lorenz*. Disisi lain, Sugiharti (2017) menganalisis ketimpangan pendidikan di Indonesia dari tahun 2005 hingga 2015 dengan menggunakan metode langsung yaitu

indeks gini dan metode tidak langsung yaitu kurva *Lorenz*. Penelitian tersebut menemukan bahwa terjadi pemerataan pendidikan yang ditandai dengan peningkatan rasio partisipasi sekolah, angka melek huruf, dan rata-rata lama sekolah. Penurunan nilai gini pendidikan ditemukan sebesar 0,353 pada tahun 2005 menjadi 0,318 pada tahun 2012.

Alokasi Dana Pemerintah untuk Pendidikan

Shao et al. (2019) yang meneliti pengaruh sistem *transfer payment* khusus untuk pendidikan terhadap pemerataan pendidikan di China pada tahun 2017. Hasil yang diperoleh adalah pencapaian pemerataan pendidikan berkaitan erat dengan alokasi dana untuk pendidikan yang adil dan merata. Keadilan alokasi dana untuk pendidikan bagi setiap daerah dalam suatu negara pada akhirnya akan mewujudkan keadilan pendidikan. Salah satu upaya pemerintah untuk membuat alokasi dana menjadi jauh lebih efektif di Indonesia adalah dengan mengimplementasikan penyerahan wewenang pemerintah pusat ke pemerintah daerah, termasuk wewenang penggunaan anggaran yang diwujudkan dalam bentuk dana perimbangan. Kebijakan alokasi dana perimbangan ini dimaksudkan dengan tujuan, antara lain: (1) Memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah; (2) menciptakan sistem pembiayaan daerah yang adil, proporsional, rasional, transparan, partisipatif, akuntabel, dan pasti; dan (3) mewujudkan keseimbangan sistem keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang mencerminkan pembagian kewenangan dan tanggung jawab secara jelas antara pemerintah pusat dan daerah (Soejoto et al., 2015).

Alokasi dana pemerintah khusus untuk pendidikan menjadi salah satu upaya penyaluran dana yang efektif dan merata bagi seluruh daerah di Indonesia. Penyaluran dana ini diharapkan dapat meningkatkan pemerataan pendidikan guna menciptakan peningkatan kualitas hidup manusia setiap individu. Berkaitan dengan hal tersebut, pengeluaran pemerintah untuk pendidikan ditemukan memberikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan pemerataan pendidikan. Hal tersebut telah diteliti oleh Hartoyo et al., (2017) yang menganalisis keterkaitan antara pendidikan dengan pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, jumlah penduduk miskin, dan pemekaran daerah di Provinsi Aceh pada tahun 2008 hingga 2013. Disisi lain, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Shao et al. (2019), terdapat ketimpangan pendanaan pendidikan antar wilayah yang terjadi di China. Dalam penelitian tersebut, diperoleh hasil bahwa pendanaan untuk provinsi dan kota di wilayah timur lebih tinggi 3,1 kali lipat dibandingkan dengan wilayah barat. Selain itu, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Shao et al. (2019) yang menyatakan bahwa terdapat ketimpangan pendanaan pendidikan antar wilayah yang terjadi di negara China, dimana pendanaan untuk provinsi dan kota di wilayah timur lebih tinggi 3,1 kali lipat dibandingkan dengan wilayah barat. Bercermin dari penelitian-penelitian tersebut, dapat dikatakan bahwa kesenjangan alokasi dana untuk pendidikan akan memberikan pengaruh positif terhadap kesenjangan pendidikan. Semakin besar kesenjangan dana yang disalurkan pada setiap daerah, semakin besar pula kesenjangan pendidikan. Oleh karenanya, pemerintah perlu memperhatikan pengalokasian dana agar tersalurkan secara merata guna memenuhi kebutuhan sektor pendidikan.

Keterkaitan Infrastruktur Pendidikan dan Ketimpangan Pendidikan

Infrastruktur pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam menunjang tingkat pemerataan pendidikan yang lebih baik. Infrastruktur pendidikan yang dimaksud dapat berupa segala hal yang menunjang segala kegiatan belajar mengajar. Ndjebakal Souck & Nji (2017) meneliti pengaruh fasilitas sekolah terhadap efisiensi kegiatan belajar mengajar pada tingkat sekolah menengah Yaounde Centre di Kamerun pada tahun 2016. Hasil menunjukkan bahwa fasilitas sekolah secara signifikan mempengaruhi efisiensi kegiatan belajar mengajar sekolah tingkat menengah di Yaounde Centre, Kamerun. Oleh karena itu, semakin banyak atau baiknya infrastruktur pendidikan maka tingkat pemerataan pendidikan suatu daerah pun akan mengalami peningkatan. Salah satu caranya dengan pembangunan sekolah dengan menggunakan dana yang berasal dari pemerintah pusat. Hal tersebut dibuktikan dengan penelitian Schady & Paxson (2002) yang menyatakan bahwa melakukan pembangunan dan renovasi fasilitas sekolah berdampak positif terhadap tingkat pendidikan di Peru pada tahun 1999. Selain itu, Barrett et al. (2019) menyatakan bahwa sekolah yang memiliki fasilitas

yang memadai dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan angka partisipasi dan pemerataan pendidikan.

Keterkaitan Pendapatan dan Ketimpangan Pendidikan

Terdapat beberapa penelitian yang menyebutkan hubungan antara tingkat pendapatan dengan ketimpangan pendidikan. Machin & Vignoles (2004) meneliti hubungan antara pendapatan dengan pencapaian pendidikan di negara UK. Hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara pendapatan dan pencapaian pendidikan pada individu kelahiran 1958 dan 1970. Semakin tinggi pendapatan orang tua maka anak-anak akan menambah gelar pendidikan yang didapatkan secara substansial. Hal tersebut membuat meningkatnya ketidaksetaraan pendidikan yang terjadi dikarenakan persentase anak yang mendapatkan gelar dari keluarga kaya terus meningkat dari tahun ke tahun. Hasil serupa juga ditemukan oleh Pfeffer (2018) dimana terdapat hubungan yang positif antara pendapatan dengan pencapaian gelar pada kelompok yang lahir tahun 1970-an dan 1980-an di Amerika. Sedangkan Lin (2007) meneliti pengaruh pendapatan keluarga terhadap tingkat pendidikan anak di China menggunakan data tahun 2014. Hasil yang ditemukan menunjukkan bahwa pendapatan keluarga berpengaruh signifikan terhadap tingkat pendidikan anak, dan peningkatan pendapatan keluarga dapat meningkatkan tingkat pendidikannya.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan data panel yang terdiri dari 34 provinsi di Indonesia periode 2015 hingga 2019. Pemilihan jumlah provinsi ke dalam sampel berdasarkan jumlah seluruh provinsi di Indonesia, sedangkan pemilihan tahun didasarkan pada ketersediaan data laporan. Penelitian ini menggunakan variabel dependen, yaitu indeks gini pendidikan, sedangkan penggunaan variabel independen terdiri dari dana pemerintah, angka melek huruf, dan infrastruktur pendidikan. Adapun ketentuan variabel, satuan, serta sumber data yang kami gunakan sebagai berikut:

Tabel 1. Data dan Sumber Data

Variabel	Keterangan	Satuan	Sumber Data
Dana Pemerintah	Total anggaran pemerintah yang dialokasikan khusus untuk pendidikan.	Miliar Rupiah	Kementerian Pendidikan
Infrastruktur Pendidikan	Jumlah bangunan atau gedung sekolah yang ada di setiap daerah.	Unit	Badan Pusat Statistik
Pendapatan	Rata-rata pendapatan yang didapatkan oleh masyarakat di setiap provinsi.	Juta Rupiah	Badan Pusat Statistik

Ketimpangan pendidikan merupakan suatu keadaan dimana terjadinya ketidakmerataan pola distribusi dalam pencapaian pendidikan. Thomas et al. (2000) menyatakan bahwa indikator dalam melihat ketimpangan pencapaian pendidikan antarindividu dalam suatu wilayah dengan menggunakan koefisien gini pendidikan dengan rumus sebagai berikut:

$$E_L = \left(\frac{1}{\mu}\right) [p_2(y_2 - y_1)p_1 + p_3(y_3 - y_1)p_1 + p_3(y_3 - y_2)p_2 + \dots + p_7(y_7 - y_1)p_1 + p_7(y_7 - y_2)p_2 + p_7(y_7 - y_3)p_3 + p_7(y_7 - y_4)p_4 + p_7(y_7 - y_5)p_5 + p_7(y_7 - y_6)p_6]$$

(1)

E_L adalah Indeks Gini Pendidikan didasarkan pada distribusi pencapaian sekolah, μ adalah rata-rata bersekolah dari populasi, p_1 adalah proporsi populasi tidak sekolah, p_2 adalah proporsi populasi

tamat sekolah dasar, dan seterusnya hingga p_7 adalah proporsi populasi tamat sekolah selama 12 tahun. y_1 adalah tahun bersekolah untuk anak yang tidak sekolah, $y_1 = 0$, y_2 adalah tahun bersekolah untuk anak yang menamatkan sekolah dasar, dan seterusnya hingga y_7 adalah tahun bersekolah untuk anak yang menamatkan sekolah selama 12 tahun. Dalam melihat hubungan antara variabel gini, dana pendidikan, infrastruktur pendidikan, dan rata-rata pendapatan masyarakat, maka penelitian ini menggunakan model estimasi sebagai berikut:

$$Gini_{it} = \alpha + \beta_1 DP_{it} + \beta_2 IP_{it} + \beta_3 INCOME_{it} + \varepsilon_{it} \quad (2)$$

$Gini_{it}$ adalah Gini pendidikan provinsi i pada periode t , DP_{it} adalah dana pendidikan provinsi i pada periode t , IP_{it} adalah infrastruktur pendidikan provinsi i pada periode t , $INCOME_{it}$ adalah rata-rata pendapatan masyarakat provinsi i pada periode t , dan ε_{it} adalah *Error term*.

Hasil dan Pembahasan

Ketimpangan pendidikan merupakan suatu kondisi dimana tidak meratanya akses pendidikan yang didapatkan di setiap daerah. Shao et al. (2019) mengatakan bahwa daerah yang memiliki perekonomian lebih baik maka memiliki tingkat pencapaian pendidikan lebih baik dibandingkan daerah yang kurang berkembang. Dalam mengukur ketimpangan yang terjadi, Thomas et al. (2000) menggunakan indeks gini pendidikan yang merupakan pengembangan dari pengukuran koefisien gini dalam pendapatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat ketimpangan pendidikan di 34 provinsi Indonesia selama periode 2015 hingga 2019 dengan metode pengukuran dalam Thomas et al. (2000). Hasil yang didapatkan dapat terlihat pada tabel 3 (dalam lampiran).

Berdasarkan hasil yang tertera pada tabel 3 (dalam lampiran), menunjukkan bahwa terjadinya ketimpangan yang terjadi antar provinsi di Indonesia. Sebagai contoh, provinsi Papua memiliki indeks gini selalu diatas 0,5 selama tahun 2015-2019. Hal tersebut sangat berbeda dengan kondisi pendidikan di provinsi DKI Jakarta, dimana setiap tahunnya selalu berada di kisaran angka 0,20. Selain itu, dapat terlihat pula antar provinsi dalam pulau yang sama masih memiliki perbedaan kualitas pendidikan yang dimiliki. Provinsi Kalimantan Timur memiliki nilai 0,20 setiap tahunnya. Sedangkan provinsi Kalimantan Barat mendapatkan nilai 0,40.

Selain itu, penelitian ini juga melihat bagaimana pengaruh dana pendidikan, infrastruktur pendidikan, dan pendapatan daerah terhadap pemerataan pendidikan di Indonesia. Berdasarkan tujuan tersebut, indikator yang digunakan untuk mencerminkan dana pemerintah (DP) adalah total pengeluaran pemerintah yang dialokasikan khusus untuk bidang pendidikan, infrastruktur pendidikan (IP) dicerminkan dari jumlah bangunan atau gedung sekolah yang dibangun, serta rata-rata pendapatan daerah (INCOME). Berikut ini merupakan hasil estimasi yang diperoleh:

Tabel 2. Hasil Regresi Model

Variabel	Coefficient	Prob.
C	0,533224	0,0000
DP	-8,08E-07	0,0491
IP	-3,99E-05	0,0000
INCOME	4,16E-06	0,1801
R-Squared	0,984945	

Tabel 2 menunjukkan hasil estimasi pengaruh variabel independen dana pendidikan (DP), infrastruktur pendidikan (IP), dan pendapatan (INCOME) terhadap variabel dependen gini pendidikan (GINI). Berdasarkan hasil estimasi tersebut, variabel DP ditemukan hasil bahwa variabel tersebut memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap GINI pada $\alpha=5\%$. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan dana pendidikan sebesar 1 miliar dapat menurunkan gini

pendidikan sebesar 0,000000808%. Variabel IP ditemukan pula memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap gini pendidikan. Nilai dari koefisien menunjukkan bahwa peningkatan infrastruktur pendidikan sebesar 1 unit maka akan menurunkan gini pendidikan sebesar 0,0000399%. Apabila dilihat dari sisi pendapatan, INCOME memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap gini pendidikan pada $\alpha=5\%$. Kenaikan pendapatan sebesar 1 juta dapat meningkatkan gini pendidikan sebesar 0,00000416%. Berdasarkan tabel 2 ditunjukkan pula bahwa nilai R^2 dalam model persamaan 1 adalah sebesar 0,984945. Nilai tersebut menjelaskan bahwa variabel dependen yaitu GINI dapat dijelaskan oleh variabel DP, IP, dan INCOME sebesar 98,5%, sedangkan sebesar 1,5% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak masuk dalam penelitian.

Hasil regresi menunjukkan bahwa dana pendidikan dan infrastruktur pendidikan memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap gini pendidikan, sedangkan pendapatan mendapatkan hasil yang positif namun tidak signifikan. Adanya dana pendidikan yang disalurkan dari pemerintah pusat ke setiap daerah terbukti memiliki hasil yang baik dalam menurunkan tingkat ketimpangan. Hal tersebut sesuai dengan penelitian Hartoyo et al. (2017); Shao et al. (2019) yang menyatakan bahwa dana pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan pemerataan pendidikan. Selain itu, adanya pembangunan infrastruktur pendidikan dengan cara penambahan jumlah sekolah yang ada juga terbukti dapat menurunkan tingkat ketimpangan yang terjadi. Hasil tersebut sesuai dengan temuan Schady & Paxson (2002) yang menyatakan pembangunan sekolah dapat berdampak positif terhadap tingkat pendidikan di Peru. Akan tetapi, jika dilihat berdasarkan hasil regresi yang didapatkan, dampak yang dihasilkan dengan adanya dana pendidikan dan pembangunan infrastruktur pendidikan hanya memiliki pengaruh yang sangat sedikit. Hal tersebut dapat terjadi karena diakibatkan oleh kurang efisiennya penggunaan dana pendidikan atau pembangunan infrastruktur yang dapat dijelaskan oleh variabel lainnya. Adanya dana pendidikan dapat berjalan tidak efektif dapat diakibatkan oleh tingkat korupsi atau pun pengalokasian dana pendidikan yang tidak merata antar daerah, dimana daerah kaya mendapatkan proporsi dana yang sama dengan daerah yang miskin (Shao et al., 2019). Sedangkan adanya infrastruktur pendidikan yang mumpuni, namun kualitas tenaga pendidik yang kurang baik juga dapat berdampak terhadap kualitas pendidikan pada daerah tersebut.

Kesimpulan dan Implikasi

Pendidikan memegang peran penting sebagai investasi sumber daya manusia yang dapat meningkatkan produktivitas kerja seseorang dan pada akhirnya dapat meningkatkan tingkat pendapatan. Dalam jangka panjang, pendidikan akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, pada kenyataannya ketidakmerataan tingkat pendidikan antar daerah masih terjadi di berbagai negara (Thomas et al., 2000). Oleh karena itu penelitian ini ingin mengetahui indeks gini pendidikan di 34 provinsi Indonesia dan selanjutnya mengetahui apakah terdapat hubungan dengan dana pendidikan, infrastruktur pendidikan, dan rata-rata pendapatan periode 2015-2019. Hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa ketimpangan pendidikan masih terjadi terutama di provinsi wilayah barat dan timur Indonesia. Selain itu, hasil regresi menunjukkan dana pendidikan dan infrastruktur pendidikan memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan dalam mengurangi ketimpangan pendidikan, sedangkan tingkat pendapatan mendapatkan hasil yang tidak signifikan. Akan tetapi, dampak yang dihasilkan tidak terlalu besar karena terdapatnya faktor-faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini seperti tingkat korupsi yang dapat menghambat efektifnya dana pendidikan atau pun adanya sekolah tidak disertai dengan kualitas tenaga pendidik yang belum mencukupi. Hal tersebut dapat menjadi bahan untuk penelitian selanjutnya sehingga dapat lebih mengetahui terkait dengan pendidikan di Indonesia lebih dalam.

Berdasarkan temuan yang didapatkan, kami memiliki beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah. Pertama, dibutuhkan upaya pemerintah dalam mengurangi tingkat ketimpangan yang terjadi. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah meningkatkan alokasi anggaran melalui transfer dana khusus untuk pendidikan kepada setiap daerah. Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang telah menunjukkan bahwa transfer dana pendidikan berhubungan positif dengan pendidikan. Dalam hal tersebut, semakin besar transfer dana khusus untuk pendidikan akan berdampak pada meningkatnya pemerataan pendidikan. Dengan demikian, setiap masyarakat dapat

mengakses pendidikan dan terciptanya peningkatan kualitas modal manusia. Kedua, pemerintah maupun pihak sekolah harus terus melakukan pembangunan infrastruktur sarana penunjang pendidikan. Hal tersebut dapat berdampak dengan semakin banyaknya masyarakat terpelosok untuk mendapatkan pendidikan yang baik serta dapat meningkatkan kualitas belajar dari pada siswa. Semakin banyak anak yang mendapatkan pendidikan, maka ketimpangan pendidikan akan semakin rendah.

Daftar Pustaka

- Barrett, P., Treves, A., Shmis, T., Ambasz, D., & Ustinova, M. (2019). The Impact of School Infrastructure on Learning: A Synthesis of the Evidence. *The Impact of School Infrastructure on Learning: A Synthesis of the Evidence*. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1378-8>
- Cahyaningsih, A., & Fitriady, A. (2019). The impact of asymmetric fiscal decentralization on education and health outcomes: Evidence from Papua Province, Indonesia. *Economics and Sociology*, 12(2), 48–63. <https://doi.org/10.14254/2071-789X.2019/12-2/3>
- Deaton, A. (1998). The analysis of household surveys: a microeconomic approach to development policy. *The Analysis of Household Surveys: A Microeconomic Approach to Development Policy*.
- Hartoyo, S., Syaukat, Y., & Oktaviani, R. (2017). The Effect of Government Spending on Education in Aceh Province Indonesia. *Journal of Economic Development, Environment and People*, 6(4), 18–28.
- Lin, C. H. A. (2007). Education expansion, educational inequality, and income inequality: Evidence from Taiwan, 1976-2003. *Social Indicators Research*, 80(3), 601–615. <https://doi.org/10.1007/s11205-006-0009-8>
- Maas, J. van L., & Criel, G. (1982). *Distribution of primary school enrollments in Eastern Africa*. 511, 109.
- Machin, S., & Vignoles, A. (2004). Educational inequality: The widening socio-economic gap. *Fiscal Studies*, 25(2), 107–128. <https://doi.org/10.1111/j.1475-5890.2004.tb00099.x>
- Ndjebakal Souck, E., & Nji, G. (2017). The Effects of School Facilities on Internal Efficiency: The Case of Selected Bilingual Secondary Schools in Yaounde Centre. *World Journal of Research and Review*, 4(4), 41–48. www.wjrr.org
- Paxson, C., & Schady, N. R. (2002). The allocation and impact of social funds: Spending on school infrastructure in Peru. *World Bank Economic Review*, 16(2), 297–319. <https://doi.org/10.1093/wber/16.2.297>
- Pfeffer, F. T. (2018). Growing Wealth Gaps in Education. *Demography*, 55(3), 1033–1068. <https://doi.org/10.1007/s13524-018-0666-7>
- Shao, Y., Liu, W., & Ji, M. (2019). Education equity in special education transfer payments to low-income groups. *Revista de Cercetare Si Interventie Sociala*, 65, 163–186. <https://doi.org/10.33788/rcis.65.11>
- Soejoto, A., Subroto, W. T., & Suyanto. (2015). Fiscal decentralization policy in promoting indonesia human development. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 5(3), 763–771.
- Sugiharti, L. (2017). Education Performance and the Determinants of Secondary School Enrolment in Indonesia. *Global Journal of Business and Social Science Review*, 5(3), 33–42.
- Thomas, V., Wang, Y., Fan, X., & Bank, W. (2000). Measuring Education Inequality: Gini Coefficients of Education. *World*, 1–37. <http://www.worldbank.icebox.ingenta.com/content/wb/wps4301/1999/00000001/0000001/art02525>
- Xie, T. (2011). Analysis on inter-provincial disparities of China's rural education and convergence rate. *International Journal of Educational Management*, 25(7), 714–723. <https://doi.org/10.1108/09513541111172117>

Lampiran 1. Gini Pendidikan

Provinsi	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Nanggroe Aceh Darussalam	0,27	0,27	0,27	0,25	0,25
Sumatera Utara	0,27	0,27	0,28	0,26	0,26
Sumatera Barat	0,30	0,30	0,30	0,28	0,28
Riau	0,29	0,30	0,29	0,27	0,27
Jambi	0,32	0,32	0,32	0,30	0,29
Sumatera Selatan	0,33	0,33	0,33	0,32	0,31
Bengkulu	0,31	0,30	0,30	0,29	0,29
Lampung	0,33	0,33	0,32	0,31	0,31
Kepulauan Bangka Belitung	0,36	0,35	0,35	0,34	0,33
Kepulauan Riau	0,24	0,26	0,25	0,25	0,24
DKI Jakarta	0,20	0,21	0,20	0,19	0,19
Jawa Barat	0,32	0,32	0,31	0,30	0,30
Jawa Tengah	0,38	0,37	0,36	0,35	0,34
DI Yogyakarta	0,28	0,28	0,28	0,27	0,26
Jawa Timur	0,38	0,37	0,37	0,36	0,35
Banten	0,30	0,30	0,30	0,28	0,28
Bali	0,34	0,33	0,32	0,31	0,30
Nusa Tenggara Barat	0,43	0,43	0,43	0,41	0,39
Nusa Tenggara Timur	0,41	0,41	0,41	0,39	0,37
Kalimantan Barat	0,40	0,40	0,40	0,39	0,37
Kalimantan Tengah	0,31	0,31	0,31	0,30	0,29
Kalimantan Selatan	0,34	0,34	0,33	0,32	0,31
Kalimantan Timur	0,26	0,26	0,27	0,25	0,25
Kalimantan Utara	0,31	0,30	0,31	0,29	0,28
Sulawesi Utara	0,27	0,28	0,27	0,26	0,26
Sulawesi Tengah	0,32	0,32	0,31	0,30	0,29
Sulawesi Selatan	0,36	0,36	0,35	0,34	0,33
Sulawesi Tenggara	0,33	0,32	0,32	0,30	0,29
Gorontalo	0,40	0,39	0,39	0,38	0,36
Sulawesi Barat	0,40	0,40	0,39	0,37	0,36
Maluku	0,27	0,27	0,29	0,25	0,25
Maluku Utara	0,30	0,29	0,30	0,29	0,28
Papua Barat	0,39	0,38	0,37	0,37	0,34
Papua	0,57	0,56	0,53	0,52	0,52